

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dilakukan sehingga menyebabkan pendapatan per kapita penduduk di suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Salah-satu tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), dimana secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan, akan tetapi dilain sisi dihadapkan dengan berbagai kendala khususnya dibidang ketenagakerjaan, seperti perkembangan jumlah angkatan kerja yang cukup pesat namun tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup.

Kendala lain yang merupakan kendala pokok dibidang ketenagakerjaan yaitu, penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualifikasi yang dituntut oleh pasar tenaga kerja, meskipun permintaan sangat tinggi, sehingga timbul angka pengangguran yang tinggi. Sejalan dengan pembangunan ekonomi nasional, maka adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan kemauan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja menjadi kesempatan kerja masih menjadi masalah utama di bidang perekonomian. (Mudrajat Kuncoro, 2004).

Menyediakan kesempatan kerja yang sesuai dengan jumlah calon tenaga kerja yang tersedia merupakan tanggung jawab penting suatu perekonomian. Dalam suatu perekonomian yang bersifat laizzer-faire atau sistem pasaran bebas, tanggung

jawab itu terutama berada di tangan perusahaan-perusahaan swasta, semakin tinggi kesempatan kerja yang akan diciptakannya, (Sukirno, 2000). Artinya dalam sistem pasaran bebas jika tanggung jawab itu tidak berada di tangan perusahaan-perusahaan swasta maka akan semakin rendah kesempatan kerja yang akan diciptakannya, dengan itu jumlah calon tenaga kerja yang tersedia akan banyak yang menganggur, dan orang yang menganggur itu disebut pengangguran.

Pengangguran adalah dimana seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Sukirno, 2010:472). Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah dari pada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.

Masalah dibidang perekonomian juga terjadi di Pulau Jawa tepatnya di provinsi Jawa Timur, yaitu masih tingginya angka pengangguran, Banyaknya pengangguran yang ada di provinsi Jawa Timur menempatkan Jawa Timur berada di urutan ke-3 terbanyak di antara provinsi yang ada di Pulau Jawa, terbukti dari data yang ada pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Perbandingan Kondisi Ketenagakerjaan di Jawa Timur Tahun 2012 Dengan
Kondisi Ketenagakerjaan Nasional dan Provinsi Lainnya
AGUSTUS 2012

No	Wilayah	Penduduk Kerja	Usia	Angkatan Kerja	Penganggur	TPT
1	Nasional	173.926.703		118. 053.110	7.244.956	6,14%
2	Provinsi Banten	7.880.915		5.125. 057	519.210	10,14%
3	Provinsi Jawa Barat	31.594.141		20.150.094	1.828.986	9,08%
4	Provinsi DKI Jakarta	7.502.191		5.368.572	529.976	9,87%
5	Provinsi Jawa Tengah	23.933.408		17.095.031	962.141	5,63%
6	Provinsi DIY	2.745.072		1.944.858	77.150	3,97%
7	Provinsi Jawa Timur	28.586.928		19.901.558	819.460	4,12%

Sumber: website depnakertrans.go.id

Hingga Agustus 2012 angka pengangguran masih tergolong cukup besar, angka pengangguran yang mencapai 819.460 jiwa membuat Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan pengangguran terbesar no-3 di Pulau Jawa, sedangkan secara nasional angka pengangguran mencapai 7.244.956 jiwa.

Permasalahan tingginya jumlah pengangguran ini memang sudah lama terjadi di Jawa Timur, namun tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan bahwasannya masih ada 16 kabupaten/kota yang tingkat pengangguran terbukanya meningkat dalam satu tahun terakhir, silahkan lihat tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa
Timur Tahun 2011-2012

Kabupaten/Kota	TPT		Meningkat/Menurun
	2011	2012	
01. Pacitan	2,70	1,16	Menurun
02. Ponorogo	4,37	3,26	Menurun
03. Trenggalek	3,18	3,14	Menurun
04. Tulungagung	3,58	3,18	Menurun
05. Blitar	3,61	2,86	Menurun
06. Kediri	4,54	4,16	Menurun
07. Malang	4,63	3,79	Menurun
08. Lumajang	2,70	4,70	Meningkat
09. Jember	3,95	3,91	Menurun
10. Banyuwangi	3,71	3,40	Menurun
11. Bondowoso	2,84	3,75	Meningkat
12. Situbondo	4,74	3,31	Menurun
13. Probolinggo	3,20	1,98	Menurun
14. Pasuruan	4,83	6,43	Meningkat
15. Sidoarjo	4,75	5,21	Meningkat
16. Mojokerto	4,31	3,42	Menurun
17. Jombang	4,24	6,69	Meningkat
18. Nganjuk	4,73	4,22	Menurun
19. Madiun	3,37	4,16	Meningkat
20. Magetan	3,16	3,86	Meningkat
21. Ngawi	4, 06	3, 05	Menurun
22. Bojonegoro	4,18	3,51	Menurun
23. Tuban	4,15	4,25	Meningkat
24. Lamongan	4,40	4,98	Meningkat
25. Gresik	4,36	6,72	Meningkat
26. Bangkalan	3,91	5,32	Meningkat
27. Sampang	3,91	1,78	Menurun
28. Pamekasan	2,89	2,30	Menurun
29. Sumenep	3,71	1,19	Menurun
30. Kota Kediri	4,93	7,85	Meningkat
31. Kota Blitar	4,20	3,55	Menurun
32. Kota Malang	5,19	7,68	Meningkat
33. Kota Probolinggo	4,66	5,12	Meningkat
34. Kota Pasuruan	4,92	4,34	Menurun
35. Kota Mojokerto	5,86	7,32	Meningkat
36. Kota Madiun	5,15	6,71	Meningkat
37. Kota Surabaya	5,15	5, 07	Menurun
38. Kota Batu	4,57	3,41	Menurun

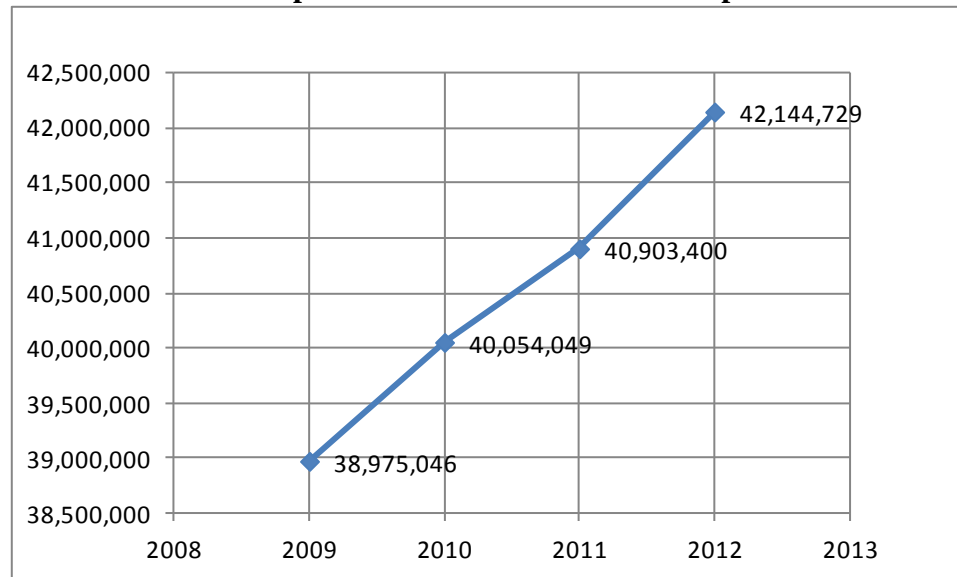
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas 2011-2012 (data di olah).

Berdasarkan data di atas tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten/kota di Jawa Timur dalam satu tahun terakhir memperlihatkan bahwasannya ada 16 kabupaten/kota yang tingkat pengangguran terbukanya masih meningkat yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Madiun. Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran yang ada pada kabupaten/kota di Jawa Timur masih tergolong cukup besar dengan Pertumbuhan angkatan kerja yang cepat namun pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di Jawa Timur menjadi semakin serius, masih besarnya tingkat pengangguran merupakan cermin dari kurang berhasilnya pembangunan di suatu daerah khususnya pada orang yang mencari kerja di Jawa Timur.

Masalah pengangguran memang sering kali menjadi Salah satu hambatan pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang dan yang sekaligus merupakan ciri negara-negara tersebut ialah tingginya jumlah penduduk. Begitu juga di Jawa Timur, masih tingginya jumlah pengangguran yang ada tentunya tidak terlepas dari tingginya jumlah penduduk yang ada di Jawa Timur.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang ada di provinsi Jawa Timur dapat di lihat pada Grafik 1.1 di bawah ini:

Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Jawa Timur Dalam Empat Tahun Terakhir Berdasarkan
Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota



Sumber: Website Depnakertrans.go.id

Berdasarkan data pada Grafik 1.1 di atas jumlah penduduk yang ada di Jawa Timur cenderung semakin meningkat setiap tahunnya, dari tahun 2009 jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 38.975.046 jiwa terus meningkat hingga pada tahun 2012 jumlah penduduk di Jawa Timur telah mencapai 42.144.729 jiwa. Hal ini menandakan bahwasannya jumlah calon tenaga kerja juga semakin meningkat.

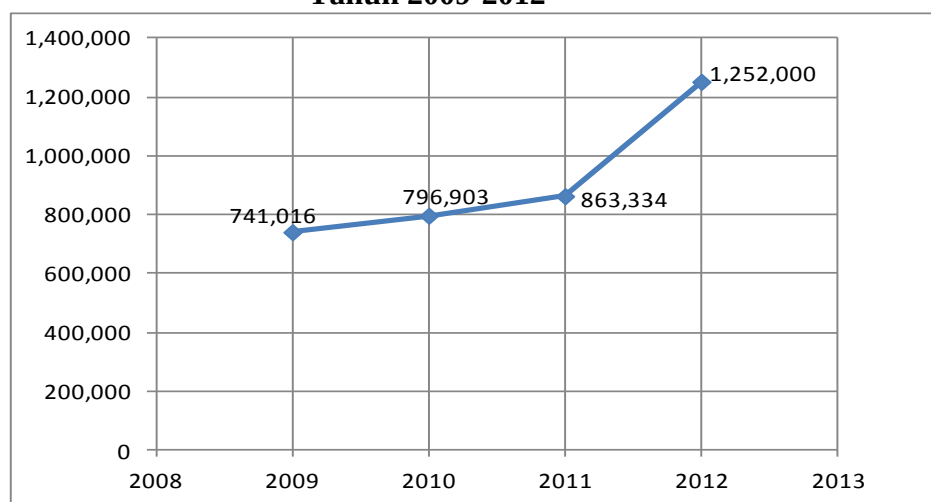
Berbicara masalah tenaga kerja pasti berkaitan dengan tingkat upah, tingkat upah yang selama ini berlaku di Jawa Timur cenderung membuat masyarakat Jawa Timur itu sendiri harus melihat terlebih dahulu nilainya, karena tentunya masyarakat tidak akan mau bekerja dengan upah yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Tingkat upah dari setiap tenaga kerja selalu berbeda. Suatu kunci terhadap perbedaan tingkat upah terletak pada kualitas yang sangat berbeda diantara tenaga

kerja, perbedaan kualitas ini disebabkan oleh pembawaan mental, kemampuan fisik, jumlah tamatan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman. Penyebab yang paling berpengaruh yaitu tamatan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman seseorang. Setiap orang berbeda dalam kemampuan dan kontribusinya bagi pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Semakin tinggi kualitas seseorang maka akan semakin besar kontribusinya bagi perusahaan, sehingga upah yang diterima juga semakin besar. Tingkat upah terendah yang diberikan oleh perusahaan adalah tingkat upah minimum (*Samuelson, 1993: 280*).

Tingkat upah minimum merupakan tingkat upah bagi tenaga kerja yang ditentukan oleh pihak perusahaan (Pengusaha), serikat pekerja dan pemerintah kabupaten/kota, yang tiap tahunnya mengalami perubahan sesuai kesepakatan. Besarnya tingkat Upah Minimum di provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Grafik 1.2 di bawah ini:

Grafik 1.2
Daftar Upah Minimum di Jawa Timur
Tahun 2009-2012



Sumber: Website Depnakertrans.go.id

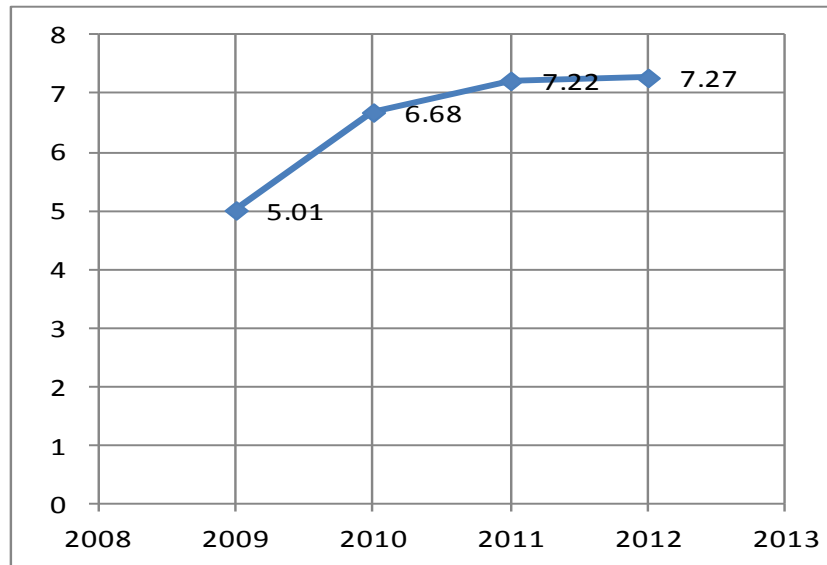
Berdasarkan data pada Grafik 1.2 di atas rata-rata upah minimum kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur cenderung naik, dari tahun 2009 yang hanya Rp 741,016 terus naik hingga pada tahun 2012 mencapai Rp 1. 252.000. hal ini juga tidak terlepas dari sistem otonomi daerah yang berlaku di Indonesia.

Otonomi daerah menyebabkan perencanaan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah melakukan berbagai gebrakan, yaitu dengan meningkatkan kualitas hasil produksi lokal seperti hasil pertanian, pertambangan, perternakan, dan lain sebagainya.

Menurut beberapa ahli ekonomi, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan dalam nilai *product domestic bruto* (PDB) atau *product domestic regional bruto* (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk (Sukirno, 2000:14).

Usaha dan gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah sedikit demi sedikit mendapatkan hasil yang tidak mengecewakan, hal ini dikarenakan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur setiap tahunnya dari tahun 2009-2012, hal ini dapat dilihat dari Grafik 1.4 di bawah ini:

Grafik 1.4
Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur
Tahun 2009-2012



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2009-2012

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwasannya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2009 yaitu 5,01 %, dan pada tahun 2010 dan 2011 meningkat menjadi 6,68 % dan 7,22 %, sedangkan di tahun 2012 meningkat lagi yaitu sebesar 7,27 %.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini akan berpengaruh terhadap jumlah pengangguran yang ada di Jawa Timur, walaupun jumlah pengangguran di Jawa Timur telah menurun selama periode 2009-2012, namun provinsi Jawa Timur masih termasuk terbesar no.3 setelah provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah di Pulau Jawa, serta masih ada 16 kabupaten/kota yang jumlah penganggurannya meningkat dalam 1 tahun terakhir.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai jumlah pengangguran yang ada di provinsi Jawa Timur, selain itu di dalam

penelitian ini juga akan dilihat seberapa besar pengaruh variabel jumlah penduduk, variabel upah minimum kabupaten (UMK), dan variabel pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tahun 2009-2012.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya ialah:

1. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk, upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tahun 2009-2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah penduduk, upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tahun 2009-2012?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan bacaan, referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang pengangguran di provinsi Jawa Timur.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan untuk mengetahui penyebab besarnya jumlah pengangguran di provinsi Jawa Timur.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III metode penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V kesimpulan, Keterbatasan, Saran, dan Daftar Pustaka.

BAB I: PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Manfaat penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang Landasan Teori, Hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menguraikan variabel penelitian dan Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang Analisis Deskriptif dan Objek Penelitian, Analisis Data, Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Menguraikan simpulan, Saran, dan Daftar Pustaka.